



WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR : 29 TAHUN 2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALOPO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

b. bahwa dalam rangka menyesuaikan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palopo, perlu menyesuaikan dengan Revisi Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo Tahun 2013-2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu diatur dalam bentuk Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186) ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Noor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor; PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 08 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Palopo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMBANGUNAN KOTA PALOPO TAHUN 2013-2018;**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palopo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Walikota adalah Walikota Palopo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo.
5. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu.
6. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
7. IKU Pemerintah Kota adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kota Palopo.
8. IKU OPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis OPD.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun Kota Palopo.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana kerja tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk priode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-OPD, adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.

12. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-OPD, adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Pasal 2

- (1) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan masing-masing unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Palopo untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Penetapan Kinerja, dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja serta Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo Tahun 2013 – 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintahan Kota Palopo dalam merencanakan program, kegiatan, dan indikator kinerjanya, wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah Kota Palopo Tahun 2013-2018 yang diatur dalam peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

TELAH DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten I		
3. Kabag Hukum		
4. Kasubag PHD		

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 9 Pebruari 2018

WALIKOTA PALOPO,


M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
Pada tanggal 9 Pebruari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,


JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2018 NOMOR 30

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PALOPO**NOMOR : 29 TAHUN 2018****TANGGAL : 9 Pebruari 2018****INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA PALOPO**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini Laporan Keuangan	Predikat Laporan Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan RI	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Badan Pendapatan & Pengelolaan Aset Daerah, Seluruh SKPD
2	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja daerah	Hasil Evaluasi LAKIP	Predikat Laporan Akuntabilitas Kinerja dari Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Seluruh SKPD
3	Meningkatnya pelayanan kependudukan, inovasi aparatur serta kepatuhan pada standar pelayanan publik	Status/Indeks Kepatuhan Terhadap Pelayanan Publik	Predikat Penilaian Komisi Ombudsman Terhadap Standar Pelayanan Publik	Komisi Ombudsman Republik Indonesia	Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Palopo, Seluruh SKPD
		Kategori Laporan LPPD	Predikat Penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri	Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Palopo
		Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		<i>Rasio penduduk ber KTP per</i>	Jumlah Penduduk yang Berusia 17s yang ber KTP	Dinas Kependudukan	Dinas Kependudukan dan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		<i>satuan penduduk</i>	dibagi Jumlah Seluruh Penduduk yang berusia 17s atau Telah Menikah	dan Pencatatan Sipil	Pencatatan Sipil
		<i>Rasio bayi berakte kelahiran</i>	Jumlah Bayi yang Memiliki Akte Kelahiran dibagi Jumlah Bayi yang Lahir dikali 100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		<i>Rasio pasangan berakte nikah</i>	Jumlah Pasangan Nikah yang ber-akte nikah dibagi Jumlah Seluruh Pasangan Nikah Tahun n	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		<i>Tingkat Kepemilikan KTP</i>	Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP dibagi Jumlah Penduduk Wajib KTP atau Berusia Lebih dari 17 Tahun, atau Sudah/Pernah Menikah dikali 100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Meningkatnya rasio anggaran APBD yang Lebih Pro Rakyat	Rasio Belanja Publik Terhadap Belanja Aparatur	Perbandingan Persentase Antara Belanja Aparatur dan Belanja Pembangunan/Publik, Jumlah Belanja Langsung dibagi Total Jumlah Belanja	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Rasio kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Dokumen Penganggaran	Persentase Kesesuaian Antara Dokumen Perencanaan dan Dokumen Penganggaran	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
5	Meningkatnya Kecukupan Pangan yang Berkelanjutan	Persentase Ketersediaan Bahan Pangan Utama (%)	Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg) dibagi jumlah konsumsi ril dikali 100%	Neraca Bahan Makanan (NBM)& Data Ketersediaan Pangan Strategis Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		Persentase Cadangan Pangan (%)	Jumlah Cadangan Pangan Kabupaten/Kota <i>dibagi</i> 100 Ton <i>dikali</i> 100% (Permentan 65 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan).	Neraca Bahan Makanan (NBM)& Data Ketersediaan Pangan Strategis Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
6	Meningkatnya Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Aman (%)	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul disatu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu dibagi Jumlah total sampel pangan yang diambil dipedagang pengumpul disuatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu dikali 100% (Permentan 65 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan)	Neraca Bahan Makanan (NBM)& Data Ketersediaan Pangan Strategis Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
7	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. $MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (\text{Lama sekolah penduduk ke } - i)$ dengan: P_{15+} = Jumlah Penduduk berusia 15 tahun ke atas Lama sekolah penduduk ke-i = - Tidak pernah sekolah = 0 - Masih sekolah di SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1 - Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1 - Tidak bersekolah lagi dan tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir - Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Persentase Angka Melek Huruf (%)	Jumlah Seluruh Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bisa Baca Tulis dibagi Jumlah Seluruh Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas dikali 100%	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			Formula → $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan: HLS_a^t : Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t E_i^t : Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t P_i^t : Jumlah penduduk usia i pada tahun t i : Usia ($a = 1, \dots, n$) FK : Faktor koreksi pesontren		
		Persentaase Siswa Yang Mampu Baca Tulis Al Quran (%)		Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		SD	Jumlah siswa SD yang mampu membaca tulis Al Quran <i>dibagi</i> Jumlah Seluruh Siswa SD pada tahun tersebut dikali 100%	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		SMP	Jumlah siswa SMP yang mampu membaca tulis Al Quran <i>dibagi</i> Jumlah Seluruh Siswa SMP pada tahun tersebut dikali 100%	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
8	Meningkatnya Akses dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (%)		Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		SD	Jumlah Murid Usia SD dibagi Jumlah Penduduk Usia SD dikali 100%	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		SMP	Jumlah Murid Usia SMP dibagi	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			Jumlah Penduduk Usia SMP dikali 100%		
		Persentase Cakupan Pendidikan Gratis (%)	Jumlah Siswa Pelajar Tahun ke n yang Biaya Pendidikannya Ditanggung dibagi Jumlah Seluruh Siswa Yang Ada Pada Tahun n dikali 100%	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
9	Meningkatnya kualitas Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Bersertifikasi (%)	Jumlah Guru Bersertifikasi <i>dibagi</i> Jumlah Seluruh Guru <i>dikali</i> 100%	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Persentase Tenaga Kependidikan yang Bersertifikasi (%)	Jumlah Tenaga Kependidikan yang Bersertifikasi <i>dibagi</i> Jumlah Seluruh Tenaga Kependidikan <i>dikali</i> 100%	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
10	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan dan Sarana Prasarana Pendidikan	Persentase Lembaga Penyelenggara Pendidikan Non Formal Bersertifikasi (%)	Jumlah Lembaga Penyelenggara Pendidikan Non Formal yang Bersertifikasi <i>dibagi</i> Jumlah Seluruh Lembaga Penyelenggara Pendidikan Non Formal <i>dikali</i> 100%	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Persentase lembaga PAUD yang Terakreditasi (%)	Jumlah PAUD Terakreditasi <i>dibagi</i> Jumlah Seluruh PAUD <i>dikali</i> 100%	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Persentase SD	Jumlah SD Terakreditasi <i>dibagi</i>	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		yang Terakreditasi (%)	Jumlah Seluruh SD <i>dikali</i> 100%		
		Persentase Sekolah SMP yang Terakreditasi (%)	Jumlah SMP Terakreditasi <i>dibagi</i> Jumlah Seluruh SMP <i>dikali</i> 100%	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
11	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Persentase Capaian Standar Pelayanan Kesehatan (%)	Persentase Capaian Indikator Kinerja dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Laporan Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Angka Harapan Hidup (Tahun)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
12	Meningkatnya Akses dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesehatan	Persentase Masyarakat yang Mengakses Jaminan Kesehatan (%)	Jumlah Penduduk yang Mengakses Jaminan Kesehatan <i>dibagi</i> Jumlah Penduduk <i>dikali</i> 100%	Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Jumlah Pasien Rujukan Miskin yang dilayani <i>dibagi</i> Jumlah Seluruh Pasien Rujukan Miskin yang ada <i>dikali</i> 100%	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
13	Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Kesehatan	Jumlah Faskes Rujukan (Rumah	Jumlah RS Pemerintah yang Berkategori B	Rumah Sakit Umum Daerah	Rumah Sakit Umum Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		Sakit) Pemerintah Berkategori B		Sawerigading	Sawerigading
		Persentase Faskes Tingkat Pertama (Puskesmas) yang Terakreditasi (%)	Jumlah Puskesmas Terakreditasi <i>dibagi</i> Jumlah Seluruh Puskesmas <i>dikali</i> 100%	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
14	Meningkatnya kualitas pusat ekonomi dan usaha produktif masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Angka Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi dari Badan Pusat Statistik Kota Palopo	Badan Statistik Pusat Kota Palopo	Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Bappeda, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah,
		Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB ADHK (%)	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB ADHK dari Badan Pusat Statistik Kota Palopo	Badan Statistik Pusat Kota Palopo	Dinas Perdagangan,
15	Meningkatnya industri rumah tangga produk pangan dan non pangan yang berdaya saing	PDRB Per Kapita	PDRB Per Kapita Kota Palopo dalam Release Badan Pusat Statistik Kota Palopo	Badan Statistik Pusat Kota Palopo	Dinas Koperasi & UMKM, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, Peternakan,& Perkebunan, Bagian Pemberdayaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
					Masyarakat Sekretariat Daerah, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Dinas Pemuda & Olahraga
		Persentase Penduduk yang Bekerja	Jumlah Penduduk yang Bekerja dibagi Jumlah Seluruh Penduduk dikali 100%	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Koperasi & UMKM, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, Peternakan,& Perkebunan, Bagian Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Dinas Pemuda & Olahraga

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		Persentase Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin dibagi Jumlah Penduduk dikali 100%	Badan Statistik Palopo Pusat Kota	Dinas Koperasi & UMKM, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, Peternakan, & Perkebunan, Bagian Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Dinas Pemuda & Olahraga
16	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata Terhadap PAD	Persentase Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah Dari Sektor Pariwisata (Hotel dan Restoran dsb)	Nilai Pajak dan Retribusi Daerah Dari Sektor Hotel dan Restoran tahun n dikurangi Nilai Pajak dan Retribusi Daerah Sektor Hotel dan Restoran Tahun n-1 dibagi Jumlah Seluruh Pajak dan Retribusi Hotel dan Restoran Tahun n dikali 100%	Badan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
17	Meningkatnya Dukungan Infrastruktur Daerah	Persentase Jalan Daerah Berkondisi Baik (%)	Panjang Jalan Berkondisi Baik <i>dibagi</i> Panjang Seluruh Jalan <i>dikali</i> 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
18	Meningkatnya Nilai Investasi	Perkembangan Nilai investasi (Rp/x 000)	Capaian Perkembangan/Peningkatan Nilai (Rupiah dalam Milyar) Nilai Investasi setiap tahunnya	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase Pertumbuhan Investasi/Tahun (%)	Jumlah Nilai Investasi Tahun n dikurangi Jumlah Nilai Investasi Tahun n-1 <i>dibagi</i> Jumlah Nilai Investasi Tahun n-1 <i>dikali</i> 100%	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja yang Sesuai dengan Lapangan Pekerjaan	Tingkat Pengangguran (%)	Jumlah Penduduk yang Menganggur <i>dibagi</i> Jumlah Angkatan Kerja <i>dikali</i> 100%	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Koperasi & UMKM, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, Peternakan, & Perkebunan, Bagian Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah,

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
					Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Dinas Pemuda & Olahraga
		Persentase Partisipasi Angkatan Kerja (%)	Jumlah Angkatan Kerja Umur 15 Tahun ke atas dibagi Jumlah Seluruh Penduduk yang Berusia 15 Tahun ke Atas dikali 100%	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Koperasi & UMKM, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, Peternakan,& Perkebunan, Bagian Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Dinas Pemuda & Olahraga
20	Menurunnya Luas Wilayah yang Terdampak Banjir	Persentase Luas Wilayah yang	Luas wilayah terdampak banjir dibagi Luas seluruh wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan	Dinas Pekerjaan Umum dan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		Terkena Banjir (%)	Pemukiman Kota Palopo <i>dikali</i> 100%	Penataan Ruang	Penataan Ruang,
21	Meningkatnya Kualitas Sanitasi dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Luas Kawasan Pemukiman Kumuh (%)	Luas Pemukiman Kumuh <i>dibagi</i> Luas Seluruh Pemukiman Kota Palopo <i>dikali</i> 100%	Dinas Perumahan dan Pemukiman	Dinas Perumahan dan Pemukiman
		Persentase Ruang Terbuka Hijau (%)	Luas Ruang Terbuka Hijau <i>dibagi</i> Luas Seluruh Wilayah Perkotaan <i>dikali</i> 100%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
		Persentase Penanganan Sampah (%)	Volume Sampah yang Ditangani <i>dibagi</i> Volume Produksi Sampah <i>dikali</i> 100%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
		Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Air Bersih (%)	Jumlah Rumah Tinggal yang Mengakses Air Bersih <i>dibagi</i> Jumlah Seluruh Rumah Tinggal <i>dikali</i> 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Perusahaan Daerah Air Minum Palopo
		Persentase Rumah Tangga bersanitasi (%)	Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi <i>dibagi</i> Jumlah Seluruh Rumah Tinggal <i>dikali</i> 100%	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
22	Meningkatnya Ikatan Sosial Pemerintah dan Masyarakat	Jumlah Konflik Sosial (Kasus)	Jumlah Konflik Sosial yang terjadi pada tahun n	Badan Kesatuan Bangsa dan	Dinas Sosial, Badan Kesatuan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				Politik	Bangsa dan Politik
23	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (S23)	Persentase Penegakan Perda (%)	Jumlah Kasus Pelanggaran Perda yang diselesaikan dibagi Jumlah Pelanggaran Perda dikali 100%	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
24	Berkembangnya Budaya Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal(S24)	Jumlah Iven Budaya (Kali)	Jumlah Iven Budaya yang dilaksanakan pada tahun ke-n	Dinas Kebudayaan	Dinas Kebudayaan

TELAH DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten I	<i>[Signature]</i>	
3. Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>	
4. Kasubag P4D	<i>[Signature]</i>	

WALIKOTA PALOPO,

[Signature]
M. JUDAS AMIR